

ANALISIS WACANA KRITIS TANTANGAN “CIUM LUTUT” KRISTANTUS KURNIAWAN KEPADA DEDI MULYADI

AHMAD SUNARDI

Universitas Harkat Negeri

ahmadsunardi@harkatnegeri.ac.id

Abstrak

Pernyataan Wakil Gubernur Kristantus Kurniawan menantang Dedi Mulyadi untuk membangun Kalimantan Barat menjadi viral. Pernyataan yang disertai tantangan akan mencium lutut KDM mengandung legitimasi kekuasaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pernyataan Kristantus Kurniawan dari konteks sosial, politik, dan budaya. Metode penelitian analisis wacana kritis ini menggunakan teori Norman Fairclough. Hasil penelitian diantaranya adalah: metafora hiperbolik terdapat kepercayaan diri dan tantangan cium lutut; konstruksi retorik dan konfrontatif pada diksi “silakan saja” dan “saya mau lihat”; terdapat konteks diskursif atas jawaban konten warga Sepauk; adanya delegitimasi dalam perbandingan wilayah Kalimantan Barat tidak bisa disandingkan dengan Jawa Barat dan konfigurasi kekuasaan tentang pembangunan desentralisasi yang belum merata; serta terdapat ideologi kuasa sebagai upaya agar publik tidak salah menginterpretasikan kinerja pemerintah. Simpulannya: pidato tersebut bersifat konfrontatif dan retorik, strategi legitimasi, *control diskursif*, relasi dialektis antar teks yang membentuk legitimasi.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Legitimasi Kekuasaan, Tantangan Cium Lutut

Abstracts

Deputy Governor Kristantus Kurniawan's statement challenging Dedi Mulyadi to develop West Kalimantan went viral. The statement, accompanied by a challenge to kiss the knee of KDM, conveyed the legitimacy of power. The purpose of this study is to analyze Kristantus Kurniawan's statement from a social, political, and cultural context. This critical discourse analysis method uses Norman Fairclough's theory. The results include: hyperbolic metaphors, including self-confidence and the knee-kissing challenge; rhetorical and confrontational constructions in the dictionaries "go ahead" and "I want to see"; a discursive context in the responses from Sepauk residents; delegitimization in the comparison of West Kalimantan's region, which cannot be compared to West Java, and the configuration of power regarding uneven decentralized development; and an ideology of power as an effort to prevent the public from misinterpreting government performance. The conclusions: the speech is confrontational and rhetorical, with legitimacy strategies, discursive control, and the dialectical relationship between texts that shape legitimacy.

Keywords: *Critical Discourse Analysis, Legitimacy of Power, Knee-Kissing Challenge*

PENDAHULUAN

Bahasa bukan sekadar deretan huruf atau suara yang tidak mempunyai makna, selain memiliki makna, bahasa juga mempunyai nilai tawar dalam kancah politik. Praktik politik dalam penggunaan bahasa jelas bukan hanya penggunaan alat komunikasi semata, tetapi bahasa juga sebagai instrumen dalam membentuk realita sosial, memproduksi makna, bahkan digunakan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan (Fawaid et al., 2025). Penggunaan Bahasa pada pidato seorang pejabat, dalam konteks komunikasi politik kontemporer mempunyai peran penting dan menjadi arena strategis untuk memperkokoh legitimasi dan manajemen opini publik. Aktor politik akan menggunakan diksi atau pilihan kata, metafora, dan strategi retorik tertentu, digunakan untuk membangun citra diri, mengonsolidasikan dukungan masyarakat, bahkan dapat digunakan untuk merespon berbagai kritik yang berkembang di masyarakat, termasuk kritik pada media digital (Hajrah et al., 2024). Oleh karena itu, kajian terhadap bahasa politik menjadi penting untuk memahami bagaimana kekuasaan dikonstruksi dan dipertahankan melalui praktik diskursif.

Media digital dewasa ini yang terus berkembang dapat memperkokoh posisi wacana sebagai instrumen politik yang digunakan oleh pejabat untuk menggiring opini publik sesuai dengan kehendak dan dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan. Media sosial yang semakin pesat dalam memberikan informasi, tidak dapat dielakkan dengan kemungkinan munculnya berbagai bentuk kritik, dukungan, maupun perbandingan terhadap kinerja seorang pejabat atau pemerintah (Khosravini, 2022). Berdasarkan situasi demikian, maka respons

pejabat publik terhadap opini masyarakat bukan hanya mencerminkan sikap politik, tetapi juga menegaskan strategi komunikasi bahwa seorang pejabat dapat mempertahankan legitimasi kekuasaannya (Scherz, 2022). Pidato yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia salah satunya adalah pidato yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yakni Krisantus Kurniawan, yang menanggapi pernyataan-pernyataan warganet tentang Pembangunan di Kalimantan Barat diperbanding-bandingkan dengan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Pidato tersebut menjadi polemik lantaran muncul tantangan “cium lutut” Kristanto Kurniawan kepada KDM. Pernyataan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena mengandung dimensi simbolik yang berkaitan dengan otoritas, identitas politik, dan relasi kuasa.

Seorang pejabat sudah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Penyampaian pernyataan pejabat yang mengandung kontroversi akan mudah menuai tanggapan dari masyarakat bahkan menjadi viral. Seorang pemimpin dalam menyampaikan pendapatnya terkadang mengungkapkan legitimasi bahwa yang bersangkutan mempunyai kuasa (Schwörer, 2021). Sadar atau tidak, jabatan yang melekat menjadi taruhan terhadap apa yang disampaikannya.

Legitimasi kekuasaan terkadang sering diungkapkan oleh seorang pemimpin baik sadar atau tidak sadar disampaikan di depan umum. Pernyataan seorang pemimpin secara tidak langsung mempunyai ruh komunikasi politik dan mempunyai pesan moral (Wardani et al., 2022). Fenomena komunikasi politik figur pemimpin pada ruang publik Indonesia memperlihatkan kompleksitas yang kian meningkat, terutama terkait pemanfaatan bahasa sebagai identitas kekuasaan dan legitimasi. Pernyataan pemimpin pada publik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bisa menjadi perangkat strategis untuk membangun citra, menggalang dukungan, serta mengonstruksi makna tertentu di hadapan khalayak. Konteks pernyataan-pernyataan tersebut merupakan bagian dari wacana politik beroperasi sebagai arena simbolik yang dipenuhi kepentingan ideologis (Fauzi dan Sabardila, 2023).

Fenomena pernyataan politik yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia salah satunya adalah pidato gubernur Kalimantan Krisantus Kurniawan yang secara terbuka menantang gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui ungkapan kontroversial “cium lutut”. Kristantus Kurniawan siap mencium lutut KDM jika KDM mampu membangun provinsi Kalimantan Barat. Pernyataan tersebut tidak hanya memunculkan polemik di ruang media dan viral, tetapi juga dapat dijadikan bahan penelitian bahasa yang menganalisis representasi kuasa, dominasi, serta resistensi dalam konteks politik lokal (Ardhi, 2026).

Tantangan “cium lutut” secara semantik dapat ditafsirkan sebagai simbol ketundukan sekaligus bentuk tantangan terhadap otoritas. Frasa “cium lutut” mempunyai makna metaforis yang intens, merujuk pada ekspresi penghormatan ekstrem sekaligus potensi penghinaan yang tersirat. Konstruksi bahasa semacam ini dalam perspektif analisis wacana kritis tidak bersifat netral, tetapi mengandung muatan ideologis yang menempatkan aktor tertentu dalam struktur hierarki kekuasaan (Rumaf, 2025).

Analisis pidato Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang menantang “cium lutut” kepada Dedi Mulyadi menjadi signifikan karena menunjukkan bagaimana aktor politik mengoptimalkan strategi retorik untuk memperkuat legitimasi diri sekaligus mereduksi legitimasi pihak lain. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan tidak sekadar berbicara sebagai individu, tetapi juga sebagai representasi institusional yang memiliki otoritas formal yakni sebagai pemimpin Kalimantan Barat. Oleh karena itu, setiap pernyataannya di muka umum mempunyai konsekuensi politik yang tidak dapat diabaikan (Joinaldy, 2025).

Tantangan “cium lutut” dalam pidato Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersifat konfrontatif dan mencerminkan upaya pembentukan identitas politik yang berani dan menyinggung. Strategi ini kerap dimanfaatkan dalam praktik politik populis, karena kedekatan emosional dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperoleh legitimasi. Oleh karena itu, wacana yang dihasilkan tidak hanya berfungsi informatif, tetapi juga persuasif dan sarat muatan ideologis (Hajrah et al., 2024).

Berdasarkan teori Norman Fairclough tentang Analisis Wacana Kritis bahwa bahasa dipahami sebagai praktik sosial yang tidak terpisahkan dari struktur kekuasaan. Oleh karena itu, analisis terhadap pidato ini tidak hanya berfokus pada dimensi linguistik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang mencakupinya. Pendekatan tersebut memungkinkan pengungkapan relasi kuasa yang tersembunyi di balik teks (Harun et al., 2024).

Kajian-kajian tentang bahasa dan peranannya dalam kekuasaan tentu sudah banyak di kaji dan menggunakan perspektif Analisis Wacana Kritis (AWK). Teori Norman Fairclough mengungkapkan bahwa bahasa adalah bagian dari praktik sosial yang tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan serta ideologi yang terkandung di dalamnya. Sebuah wacana bukan hanya merepresentasikan realitas, akan tetapi juga berperan aktif dalam membentuk dan mereproduksi hubungan sosial. Berkaitan dengan konsep tersebut, Teun A. van Dijk juga berpendapat bahwa wacana politik sering digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mengontrol pengetahuan, wawasan, opini, termasuk persepsi publik. Ruth Wodak juga berpendapat bahwa praktik diskursif selalu terkait

dengan konteks historis dan sosial yang memengaruhi produksi serta interpretasi teks dalam sebuah wacana. Produksi wacana adalah manusia, oleh karena itu wacana mempunyai nilai humanisasi (Choiriyah et al., 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan bahasa dan politik kebanyakan membahas Bahasa dalam kampanye dan politik baik di Tingkat nasional maupun daerah berfokus pada kampanye electoral, komunikasi kepemimpinan nasional, atau strategi pencitraan politik menjelang pemilihan umum. Penelitian berkaitan dengan respons kepala daerah terhadap kritik publik yang berkembang pada media digital khususnya media sosial khususnya dalam bentuk tantangan simbolik yang mengandung relasi kuasa dan legitimasi masih relatif terbatas (Chasanah dan Setiana, 2025). Padahal fenomena tersebut mencerminkan dinamika komunikasi modern pada ranah politik yang semakin dipengaruhi oleh interaksi antara media digital, opini publik, dan kepemimpinan daerah sebagai bentuk legitimasi kekuasaan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana konstruksi kekuasaan dan legitimasi dibentuk melalui pidato Krisantus Kurniawan, khususnya terkait tantangan “cium lutut” kepada KDM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Analisis Wacana Kritis, kajian ini akan menganalisis strategi diskursif yang digunakan serta kontribusinya dalam membentuk persepsi publik (Anggrianto, 2022).

Kajian analisis ini sangat menarik karena berkaitan dengan pernyataan pejabat publik yang menjadi viral dan banyak diperbincangkan oleh semua kalangan di Indonesia. Semoga penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika komunikasi politik di Indonesia, terutama terkait penggunaan bahasa sebagai instrumen kekuasaan. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur Analisis Wacana Kritis serta memberikan perspektif yang lebih tajam bagi pembaca dalam menafsirkan wacana politik secara kritis dan reflektif serta memberikan pembelajaran yang berarti bagi semua pemimpin untuk berhati-hati dan santun dalam menyampaikan sesuatu di muka umum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai kerangka paradigma kritis untuk menyingkap relasi kuasa dan operasi ideologi yang terselubung dalam wacana politik. Metode kualitatif bahwa bahasa tidak sekadar medium komunikasi, melainkan praktik sosial yang mempunyai andil dalam memproduksi struktur kekuasaan. Maka dari pada itu, orientasi penelitian ini tidak diarahkan pada generalisasi temuan, tetapi kajian yang mendalam terhadap praktik diskursif yang bersifat kontekstual dan spesifik (Hasibuan et al., 2022).

Analisis Wacana Kritis yang dipakai adalah teori Norman Fairclough yang mencakup tiga lapisan analisis, yakni dimensi teks (mikro), praktik diskursif (meso), dan praktik sosial (makro) (Harun et al., 2024). Teori ini dipilih karena mampu mengintegrasikan analisis linguistik dengan konteks sosial yang lebih luas, dan dapat memungkinkan pembacaan yang utuh terhadap keterkaitan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam suatu wacana.

Data primer penelitian ini adalah Pidato Walil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan yang memuat ungkapan “cium lutut” sebagai bentuk tantangan terhadap KDM. Data dikumpulkan melalui berbagai kanal, termasuk media daring, dokumentasi audiovisual, serta transkrip pidato baik resmi maupun tidak resmi yang beredar di ruang publik. Penentuan data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan fokus kajian (Kaluku et al., 2023).

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu menghimpun, menyeleksi, dan mengategorikan teks yang relevan dengan objek analisis. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan berbagai versi informasi dari media dan rekaman yang tersedia guna memastikan konsistensi dan keakuratan data. Langkah ini krusial untuk mengurangi potensi bias interpretatif sekaligus meningkatkan kredibilitas temuan.

Analisis data dilakukan sampai tiga tahap. Tahap pertama berfokus pada analisis teks yang mencakup aspek kebahasaan seperti diksi, struktur sintaksis, penggunaan metafora, serta strategi retorika yang muncul dalam pidato. Tahap kedua menelaah praktik diskursif, termasuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi wacana, serta bagaimana media mengonstruksi dan merepresentasikan pernyataan tersebut. Tahap ketiga diarahkan pada analisis praktik sosial dengan mengaitkan hasil temuan pada konteks sosial-politik yang lebih luas, khususnya terkait dinamika kekuasaan dan legitimasi dalam ranah politik lokal (Hasibuan et al., 2022).

Keabsahan data dijaga melalui penerapan triangulasi data dan triangulasi teori, disertai dengan pembacaan berulang (iteratif) terhadap teks yang dianalisis. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan prinsip reflektivitas guna menyadari posisi peneliti serta potensi bias dalam proses interpretasi (Liu et al., 2022). Pendekatan ini menjadi penting dalam paradigma kritis yang menempatkan peneliti sebagai bagian dari konstruksi pengetahuan.

Teknik analisis data menggunakan model analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Teknik ini memposisikan wacana sebagai praktik sosial yang terdiri atas tiga bagian yaitu bagian teks, praktik diskursif, dan praktik sosial (Igbashangev, 2022). Ketiga dimensi tersebut digunakan secara terpadu untuk mengungkap konstruksi kekuasaan dan legitimasi yang terkandung dalam pidato Kristantus Kurniawan terkait tantangan “cium lutut” kepada Dedi Mulyadi.

Tahap pertama dilakukan dengan cara menganalisis teks. Teks di analisis dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur linguistik yang muncul dalam pidato, meliputi pilihan kosakata, metafora, modalitas, struktur kalimat, serta strategi retorik yang digunakan pembicara (Durmaz dan Salih, 2022). Tujuan analisis ini untuk mengetahui bagaimana bahasa digunakan untuk membangun makna, memperkuat posisi pembicara, dan memengaruhi persepsi audiens. Tahapan ini berfokus pada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan relasi kuasa, legitimasi, pembelaan diri, maupun delegitimasi kekuasaan.

Tahap kedua adalah analisis praktik diskursif yaitu mengkaji proses produksi, distribusi, dan konsumsi wacana (Moghaddam, 2024). Tahapan ini mengkaji tentang latar belakang kemunculan pidato, hubungan pidato dengan video viral di media sosial yang membandingkan kondisi jalan di Kalimantan Barat dan Jawa Barat, serta bagaimana media massa dan media sosial mereproduksi pernyataan tersebut. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami bagaimana suatu wacana dibentuk sebagai respons terhadap isu yang berkembang pada media sosial.

Tahap selanjutnya adalah tahap ketiga yaitu analisis praktik sosial yang menghubungkan teks dengan konteks sosial-politik yang lebih luas (Nawaz et al., 2024). Tahapan ini masuk ke ranah menginterpretasikan pidato dalam konteks pembangunan daerah, distribusi anggaran, ketimpangan infrastruktur antarwilayah, serta dinamika komunikasi politik lokal di Indonesia. Hasil analisis ini mengungkap ideologi dan kepentingan yang mendasari produksi wacana yang ada pada pidato.

Analisis data dilakukan secara bertahap dengan cara reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penentuan simpulan (Chabert-Liddell et al., 2021). Data-data yang telah diperoleh di baca berulang-ulang dan tentukan tema yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan dan kontrol sosial. Data selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan teori Norman Fairclough sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna yang terkandung dalam pidato yang dilakukan oleh Kristantus Kurniawan.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data disajikan berupa kutipan-kutipan pidato Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kristantus Kurniawan yang menunjukkan konstruksi kekuasaan dan legitimasi kekuasaan. Penyajian data dilakukan secara tematik berdasarkan temuan yang diperoleh melalui proses analisis data (Nurrahmi, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis wacana kritis terhadap pidato Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kristantus Kurniawan memperlihatkan bahwa wacana yang dikonstruksi tidak sekadar menjadi respons atas kritik publik, melainkan berfungsi sebagai strategi diskursif untuk membangun dan menegaskan kekuasaan sekaligus legitimasi (Pakpahan et al., 2024). Secara tekstual, penggunaan frasa “cium lutut” dapat dipahami sebagai metafora hiperbolik yang mengekspresikan kepercayaan diri serta membentuk citra keberanian politik yaitu memberikan tantangan. Pernyataan tersebut tidak hanya merepresentasikan bentuk tantangan biasa, tetapi juga mengandung dimensi performatif yang menegaskan posisi dominan pembicara dalam relasi kuasa yang ditegaskan dan ditonjolkan bahwa membangun Kalimantan Barat itu tidak mudah, tidak seperti di Jawa Barat karena Kalimantan Barat daerahnya luas dan anggarannya sedikit. Sementara di Jawa Barat wilayahnya lebih sempit dan anggarannya besar.

Berdasarkan analisis linguistik, pemilihan diksi seperti “silakan saja” dan “saya mau lihat” mempunyai konstruksi retorik dan konfrontatif, walaupun ungkapan tersebut disampaikan dalam bentuk yang tampak terbuka. Struktur pernyataan tersebut mengandung implikasi bahwa tantangan yang diajukan sulit direalisasikan oleh pihak yang dituju, yakni Dedi Mulyadi (Ardhi, 2026). Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai instrumen untuk mereduksi legitimasi pihak lain sekaligus memperkuat posisi diri sebagai aktor yang memiliki otoritas dan pemahaman terhadap kompleksitas wilayah Kalimantan Barat. Frasa di atas tersirat menantang jika mampu coba saja dan mempunyai siratan itu tidak akan mungkin mampu.

Pidato tersebut juga mempunyai konteks diskursif, karena pidato tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks viralnya konten keluhan warga di Sepauk yang membandingkan kondisi infrastruktur Kalimantan Barat dengan Jawa Barat. Masyarakat Sepauk banyak yang mengeluh tentang pembangunan di daerahnya dan dibandingkan dengan pembangunan wilayah Jawa Barat yang di pimpin oleh Dedi Mulyadi. Ungkapan warga Sepauk singgah di media sosial, hingga Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahu dan meresponnya. Viralnya unggahan warga Sepauk memantik Kristantus Kurniawan hingga pemicu lahirnya pidato tersebut, sekaligus menunjukkan adanya interaksi timbal balik antara opini publik dan praktik komunikasi politik yang di tanggapinya oleh seorang pemimpin. Situasi tersebut oleh Kristantus Kurniawan di manfaatkan sebagai momentum untuk mereposisi diri sebagai pemimpin yang tanggap, sembari melakukan koreksi terhadap narasi yang dianggap tidak proporsional (Rumaf, 2025).

Pidato Wakil Gubernur Kalimantan Barat menyiratkan upaya delegitimasi terhadap perbandingan antarwilayah tampak melalui argumen bahwa membandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat adalah sesuatu yang tidak logis dan tidak relevan. Ketidaklogisan tersebut karena perbandingan luas wilayah dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang jelas berbeda. Pernyataan Wakil Gubernur tersebut terselubung strategi

yang mencerminkan mekanisme pengalihan isu dari kritik terhadap kinerja menuju pemahaman atas kondisi struktural, sehingga legitimasi kekuasaan tetap dapat dipertahankan dan marwah pemimpin ada karena memberikan argumen bahwa kondisi Kalimantan Barat berbeda dengan Jawa barat.

Pidato tersebut secara praktisi sosial menunjukkan konfigurasi kekuasaan dalam konteks desentralisasi serta ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia dan tidak dapat disamakan atau dibandingkan. Kalimantan Barat, dengan karakter geografis yang luas dan kompleks, serta anggaran yang terbatas diposisikan sebagai entitas yang tidak dapat disandingkan secara langsung dengan Jawa Barat yang memiliki wilayah geografis yang lebih sempit dan anggaran yang lebih besar tidak dapat dibandingkan dengan tingkat pembangunan infrastruktur. Wacana dalam pidato tersebut berfungsi untuk menetapkan batas rasional dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Rujukan figur Dedi Mulyadi sebagai simbol keberhasilan pembangunan di Jawa barat menunjukkan bahwa legitimasi bersifat relasional. Keberhasilan pihak lain dijadikan tolak ukur oleh warga Kalimantan Barat sekaligus tekanan simbolik terhadap otoritas lokal. Namun, melalui pidato Wakil Gubernur Kalimantan Barat “cium lutut”, Krisantus Kurniawan berupaya membalik relasi tersebut dengan menegaskan superioritasnya dalam memahami kondisi empiris di lapangan. Kristantus menegaskan Kalimantan Barat tidak dapat disamakan dengan Jawa barat, jika Dedi Mulyadi mampu membangun Kalimantan Barat dengan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan Jawa Barat, dan dengan anggaran yang lebih sedikit, maka Dedi Mulyadi tidak akan mampu membangun Kalimantan Barat seperti yang ada pada Jawa Barat.

Pidato tersebut secara ideologis juga mengandung upaya sistematis untuk membentuk kesadaran publik agar tidak mengalami kesalahan interpretasi terhadap kinerja pemerintah. Penggunaan istilah tertentu berfungsi sebagai instrumen kontrol wacana yang membatasi kemungkinan tafsir masyarakat terhadap isu pembangunan infrastruktur. Pada tataran ini bahasa dimanfaatkan untuk mengarahkan konstruksi realitas publik agar selaras dengan narasi kekuasaan, agar pemerintah sanggat gagal dalam membangun Kalimantan Barat.

Berdasarkan teori Norman Fairclough, pidato ini dapat dipahami sebagai praktik diskursif yang mengintegrasikan dimensi bahasa, kekuasaan, dan ideologi secara simultan. Donasi kekuasaan pembicara tampak dalam kemampuannya menentukan makna, sementara legitimasi dibangun melalui rasionalisasi struktural dan strategi retorik yang persuasif (Ferlien dan Rumaf, 2020). Pernyataan “cium lutut” tidak dapat dipandang sebagai ekspresi spontan semata, tetapi bagian dari strategi komunikasi politik yang terencana dalam mempertahankan otoritas serta membentuk persepsi public bahwa Kalimantan Barat tidak dapat disandingkan dengan Jawa Barat. Ungkapan “cium lutut” merupakan tantangan Wakil Gubernur Kalimantan Barat jika Dedi Mulyadi mampu membangun Kalimantan Barat dengan wilayah yang luas sementara anggaran sedikit dan itu mustahin untuk dilakukan, malaya secara simbolis Kristantus menantang Dedi Mulyadi dan ini merupakan bagian dari legitimasi kekuasaan seorang pemimpin.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari teks pidato Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan tanggapan-tanggapan warganet di media sosial, menunjukkan bahwa selain pidato sebagai respons terhadap kritik-kritik masyarakat di media sosial, dalam pidato tersebut tersirat produksi makna untuk memperkokoh legitimasi kekuasaan pemerintah Kalimantan Barat. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa pidato tersebut mempunyai unsur yang berkaitan dengan legitimasi politik, pertarungan simbolik antarelite, dan pengelolaan citra kepemimpinan di media sosial atau ruang publik. Hasil analisis-analisis tersebut sebagai berikut.

Narasi Ketimpangan Struktural yang dibangun melalui Konstruksi Realitas

Temuan pada pidato Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dibangun di atas narasi ketimpangan struktural antara provinsi Kalimantan Barat dengan provinsi Jawa Barat. Dua daerah ini tidak dapat dibandingkan, mengingat luas wilayah dan besarnya anggaran yang berbeda. Data teks dapat dilihat dari pernyataan Kristantus Kurniawan: “Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar.” Ungkapan tersebut secara tekstual bahwa pernyataan tersebut tidak sekadar mengandung tantangan secara personal kepada Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Kalimat di atas menunjukkan konstruksi realitas bahwa Kalimantan Barat tidak dapat dibandingkan dengan Jawa Barat. Dengan anggaran 6 triliun, Dedi Mulyadi di nilai tidak akan mampu membangun seperti Jawa Barat. Ini merupakan bentuk realitas yang ada, Kalimantan Barat Adalah provinsi dengan wilayah yang sangat luas, mempunyai hambatan geografis yang serius jika dibandingkan dengan Jawa Barat, maka membandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat adalah bentuk ketidak rasionalan. sementara Jawa Barat mempunyai kapasitas fiskal lebih besar, anggaran pendapatan lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan provinsi Kalimantan Barat. Membandingkan dua daerah dengan perbedaan wilayah dan anggaran yang sangat jauh merupakan hal yang tidak rasional menurut Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kristantus Kurniawan (Adityawan et al., 2025).

Berdasarkan pemikiran pada pidato tersebut, Kristantus Kurniawan berusaha menggiring realitas yang ada pada konstruksi opini Masyarakat. Krisantus Kurniawan merespons tentang adanya jalan rusak yang di unggah oleh warganet di media sosial bukan sebagai akibat dari kegagalan kepemimpinan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari kondisi struktural yang berbeda yakni anggaran yang terbatas sementara wilayahnya sangat luas (Fathilah et al., 2025). Pernyataan tersebut merupakan pernyataan dari aktor politik yang mempunyai strategi komunikasi yang mengalihkan fokus publik dari evaluasi kinerja pemerintah digiring menuju pemahaman terhadap keterbatasan anggaran yang belum mampu menjangkau pembangunan jalan rusak seluruhnya. Pernyataan tersebut berusaha menggiring rasionalisasi Masyarakat bahwa adanya jalan rusak bukan berarti pemerintah tidak bisa bekerja, melainkan karena anggarannya yang terbatas.

Berdasarkan teori Fairclough, strategi konstruksi realitas disebut sebagai proses representasi sosial. Representasi sosial oleh pejabat publik dikonstruksi berdasarkan realitas yang ada dan menghasilkan pemahaman masyarakat bahwa semua daerah tidak dapat disamakan, karena setiap daerah mempunyai luas wilayah yang berbeda termasuk kapasitas fiskal yang berbeda juga (Moghaddam, 2024). Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berusaha menciptakan kerangka interpretasi bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur menggunakan standar yang sama apalagi dengan anggaran dan luas yang berbeda.

Simbol Kekuasaan “Cium Lutut”

Penggunaan metafora “cium lutut” mempunyai makna tindakan penghormatan yang sangat tinggi terhadap seseorang, yakni bentuk penghambaan atau pengakuan seseorang kepada orang lain yang dianggap lebih berwibawa atau lebih agung. Pernyataan Wakil Gubernur Kristantus sebagai berikut: “Kalau dia bisa, saya cium lututnya.” Makna dalam pernyataan tersebut mempunyai makna yang kompleks. Pernyataan “cium lutut” mengandung unsur hiperbola yang bertujuan memperkuat keyakinan pembicara terhadap argumen yang disampaikan (Rumaf, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Krisantus Kurniawan meyakini Dedi Mulyadi mustahil akan mewujudkannya, yaitu membangun Kalimantan Barat seperti membangun Jawa Barat. Metafora “cium lutut” tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan semata, melainkan sebagai strategi retorik untuk menegaskan superioritas argumentasi yang sedang dibangun oleh seorang pejabat publik.

Metafora adalah bagian dari instrumen ideologis, dan dapat digunakan untuk membentuk persepsi publik (Komariyah et al., 2022). Penggunaan metafora “cium lutut” menciptakan efek dramatis yang membuat pesan politik lebih mudah diingat dan disebarluaskan oleh media maupun masyarakat. Hal ini menjelaskan mengapa pernyataan tersebut kemudian menjadi viral dan memperoleh perhatian luas di berbagai platform digital.

Lebih jauh, metafora ini juga memperlihatkan adanya negosiasi kekuasaan simbolik antara dua figur publik yang sama-sama memiliki legitimasi politik di wilayah masing-masing. Dedi Mulyadi direpresentasikan sebagai figur yang sedang mendapatkan pengakuan publik atas keberhasilannya membangun Jawa Barat, sedangkan Krisantus berupaya mempertahankan legitimasi pemerintah Kalimantan Barat dengan menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sumber daya yang dimiliki.

Analisis Defensif sebagai Jawaban Kritik Publik

Pidato Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kristantus Kurniawan menunjukkan bahwa pidato tersebut memiliki karakter sebagai strategi defensif yang kuat (Chasanah dan Setiana, 2025). Pernyataan Krisantus Kurniawan muncul setelah viralnya video warga Sepauk di media sosial yang membandingkan jalan rusak di Kalimantan Barat dengan infrastruktur di Jawa Barat.

Video tersebut warga menyampaikan pesan sebagai berikut:

“Jalan kami babak belur. Gubernur kami pingsan kayaknya.”

Unggahan video tersebut di media sosial sempat vital dan menjadi perbincangan warganet, video tersebut merupakan bentuk kritik langsung terhadap pemerintah daerah. Kritik yang di unggah di media sosial cepat berkembang, dan kritik tersebut berpotensi mengurangi legitimasi politik pemerintah daerah apabila tidak direspons secara memadai. Atas dasar unggahan video yang mengandung kritik tersebut, Krisantus Kurniawan dalam pidatonya berusaha menyampaikan pesan kepada Masyarakat agar dipahami sebagai upaya pemulihan legitimasi pemerintah.

Pidato tersebut dapat dinilai mengalihkan isu tentang keberadaan jalan rusak, Krisantus Kurniawan menggeser fokus diskusi menuju persoalan yang lebih luas, yaitu kapasitas fiskal daerah. Strategi pidato seperti ini dikenal sebagai *reframing discourse*, yaitu mengubah kerangka pembahasan sekadar jalan rusak dialihkan sehingga publik menilai suatu masalah dari perspektif yang berbeda, yakni daerah Kalimantan Barat tidak dapat dibandingkan dengan Jawa Barat (Fauzi dan Sabardila, 2023).

Strategi pengalihan pembahasan oleh Kristantus Kurniawan menyiratkan bahwa pemerintah daerah tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kondisi jalan, tetapi sebagai aktor yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan sumber daya (Ferrari, 2022). Kritik publik atas adanya jalan rusak di giring dan direspons melalui pembentukan narasi alternatif yang lebih menguntungkan posisi pemerintah, bahwa pemerintah tetap bekerja dan tidak ada ketimpangan di dalamnya.

Membangun Legitimasi Berdasarkan Rasionalisasi Anggaran

Berdasarkan data-data yang ada, temuan analisis berikutnya menunjukkan bahwa legitimasi dalam pidato Kristantus Kurniawan dibangun melalui penggunaan argumentasi rasional. Kristantus Kurniawan secara berulang menekankan angka APBD Kalimantan Barat hanya sebesar Rp6 triliun sebagai dasar pembelaan terhadap kondisi pembangunan di Kalimantan Barat. Anggaran tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan anggaran Provinsi Jawa Barat.

Penggunaan data dan angka berdasarkan teori legitimasi politik mempunyai fungsi untuk menghasilkan kesan objektivitas (Schwörer, 2021). Data-data dan angka-angka dianggap memiliki kekuatan persuasif karena dipersepsikan sebagai fakta yang dapat di cek atau di verifikasi oleh siapapun. Maka dari itu, penyebutan APBD sebesar Rp6 triliun bukan sekadar informasi administratif, melainkan bagian dari strategi diskursif untuk memperoleh kepercayaan publik. Secara data riil pendapatan daerah hanya Rp6 trilyun, ini sangat riskan jika digunakan untuk pembangunan Kalimantan Barat yang sangat luas.

Berdasarkan argument tersebut Kristantus Kurniawan berupaya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus dipahami dalam kerangka kemampuan fiskal daerah. Pidato tersebut memberin pesan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kualitas kepemimpinan, tetapi juga pada sumber daya yang tersedia (Schwörer, 2021). Oleh karena itu, legitimasi tidak dibangun melalui klaim personal, melainkan melalui rasionalisasi kondisi objektif yang dihadapi pemerintah daerah. Strategi ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan modern tidak selalu dijalankan melalui dominasi langsung, tetapi bisa juga melalui produksi pengetahuan, data-data dan fakta yang dianggap sah dan rasional oleh masyarakat.

Strategi Pengendalian Makna

Pidato Kristantus Kurniawan memunculkan frasa yang sangat menarik, salah satu aspek menarik dalam pidato adalah penggunaan frasa:

“Jadi masyarakat jangan sampai gagal paham.”

Frasa tersebut berdasarkan perspektif linguistik kritis mengandung makna dimensi kekuasaan yang penting. Frasa “gagal paham” secara implisit membedakan antara pemahaman yang benar dan pemahaman yang salah. Berdasarkan analisis linguistic, melalui frasa tersebut pemerintah daerah menempatkan dirinya sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan interpretasi yang dianggap benar terhadap persoalan pembangunan (Siregar et al., 2024). Kristantus Kurniawan berusaha menggiring persepsi publik agar jangan sampainsalah paham, kemudian berusaha di giring sesuai tujuan pemerintah.

Sebagai penegasan pembahasan sebelumnya, frasa tersebut menunjukkan adanya praktik kontrol diskursif. Masyarakat yang mengkritik jalan rusak di media sosial dan membandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat secara tidak langsung diposisikan sebagai pihak yang belum memahami kompleksitas pembangunan daerah (Ferlien dan Rumaf, 2020). Melalui pidato Kristantus, pemerintah tampil sebagai sumber pengetahuan yang lebih sah mengenai kondisi riil di lapangan, pemerintah merasa lebih tahu tentang kondisi daerah dan keuangannya. Ungkapan dalam pidato tersebut merupakan bentuk kekuasaan simbolik yakni berusaha bekerja melalui pembentukan cara berpikir masyarakat. Kekuasaan tidak dijalankan melalui paksaan, melainkan melalui kemampuan untuk menentukan kerangka interpretasi terhadap suatu realitas berdasarkan opini-opini yang disampaikan oleh pejabat publik.

Trasformasi Politik Melalui Media Digital

Hasil analisis di temukan bahwa pidato ini mencerminkan transformasi komunikasi politik di era digital. Pidato Kristantus Kurniawan yang muncul di meda sosial tidak muncul dalam ruang politik formal, melainkan sebagai respons terhadap konten viral di media sosial (Rahmatulloh et al., 2024). Atas dasar itu, temuan bahwa media sosial telah menjadi arena baru dalam pembentukan legitimasi politik menyadi nyata. Kritik warga Kalimantan Barat yang sebelumnya terbatas pada ruang lokal kini dapat menyebar secara nasional dan memengaruhi agenda komunikasi pejabat publik, menjadi perbincangan khalayak dan menjadi viral.

Video kritik warga Kalimantan Barat yang menampilkan bahwa Dedi Mulyadi bukan sekadar sebagai individu, tetapi sebagai simbol keberhasilan pembangunan yang diproduksi dan diperkuat melalui media digital.

Secara tidak langsung, membandingkan Pembangunan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat yang dipimpin oleh Dedi Mulyadi dianggap sebagai platform menjadikannya referensi publik dalam menilai kinerja kepala daerah lain. Unggahan kritik jalan rusak yang dibandingkan dengan Pembangunan Jawa Barat menciptakan tekanan simbolik terhadap pemerintah daerah yang memiliki karakteristik berbeda (Ritonga, 2018). Atas dasar itu, pidato Krisantus dapat dipahami sebagai upaya untuk merespons dominasi narasi pembangunan yang sedang menguntungkan figur Dedi Mulyadi, dan menegaskan bahwa Kalimantan Barat tidak dapat dibandingkan dengan Jawa Barat.

Identitas kepemimpinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pidato Krisantus Kurniawan tersebut berfungsi untuk membangun identitas kepemimpinan tertentu. Krisantus menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang berani, terbuka terhadap kritik, dan siap mempertanggungjawabkan argumentasinya di hadapan publik, termasuk pada ruang digital (Alamsyah et al., 2024). Pesan yang di munculkan Krisantus Adalah membentuk karakter melalui penggunaan bahasa yang lugas, tegas, dan konfrontatif. Tantangan terbuka siap “cium lutut” kepada Dedi Mulyadi menciptakan kesan keberanian politik yang dapat meningkatkan daya tarik di mata sebagian masyarakat.

Konteks pencitraan semacam ini dalam komunikasi politik sangat penting karena legitimasi tidak hanya bergantung pada kinerja administratif, tetapi juga pada persepsi publik terhadap karakter pemimpin (Harun et al., 2024). Maka dari itu, melalui pidato tersebut dapat dibaca sebagai upaya membangun identitas politik yang kuat di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Perebutan Legitimasi Melalui Wacana Pembangunan

Berdasarkan hasil analisis yang ada menunjukkan bahwa isu pembangunan jalan dalam pidato ini bukan semata-mata persoalan infrastruktur, melainkan arena perebutan legitimasi politik. Kritik pada media sosial tentang jalan rusak menjadi simbol ketidakpuasan publik, sementara keberhasilan pembangunan di Jawa Barat menjadi simbol efektivitas kepemimpinan. Berdasarkan kondisi tersebut, Krisantus Kurniawan melalui pidatonya berupaya mempertahankan legitimasi pemerintah Kalimantan Barat melalui tiga strategi utama. Strategi pertama, membangun narasi ketimpangan struktural yang menekankan perbedaan kondisi daerah. Strategi kedua, menggunakan metafora dan tantangan simbolik untuk memperkuat posisi argumentatif. Dan strategi yang ketiga mengarahkan interpretasi publik melalui rasionalisasi anggaran dan kompleksitas pembangunan. Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa bahasa memainkan peran sentral dalam praktik kekuasaan (Budiansih dan Asropah, 2024). Berdasarkan wacana yang dibangun melalui pidato Krisantus, maka dapat ditarik simpulan bahwa wacana tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami dan menilai realitas tersebut.

Temuan Sintesis

Hasil temuan berdasarkan analisis teks pidato Krisantus Kurniawan ditemukan praktik diskursif, dan praktik sosial yang dapat dipahami bahwa pidato Krisantus Kurniawan merupakan bentuk komunikasi politik yang dirancang untuk mempertahankan legitimasi pemerintah daerah di tengah kritik publik yang berkembang. Tantangan Krisantus tentang “cium lutut” berfungsi sebagai perangkat retorik yang menarik perhatian publik sekaligus memperkuat argumentasi mengenai keterbatasan fiskal dan geografis Kalimantan Barat tidak dapat dibandingkan dengan Jawa Barat yang dipimpin Dedi Mulyadi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pidato Krisantus memperlihatkan bagaimana kekuasaan dikonstruksi melalui bahasa, terutama melalui kemampuan aktor politik dalam mendefinisikan masalah, menentukan kerangka interpretasi, dan mengarahkan pemahaman masyarakat. Konteks pernyataan Krisantus menegaskan bahwa legitimasi tidak diperoleh semata-mata dari keberhasilan pembangunan, tetapi juga dari keberhasilan membangun narasi yang dapat diterima publik, yakni dengan cara menanggapi rasional publik dengan didukung data-data fiskal.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa wacana politik merupakan instrumen penting dalam reproduksi kekuasaan pada tataran komunikasi modern. Melalui Bahasa dan media digital aktor politik dapat mempertahankan otoritas, merespons kritik, dan membentuk persepsi masyarakat mengenai realitas sosial yang sedang diperdebatkan. Hasil temuan tersebut mempertegas bahwa analisis wacana kritis dapat membedah makna dan kandungan yang ada dalam Bahasa dan dapat mengetahui bahwa relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi selalu hadir dalam setiap praktik komunikasi politik, termasuk dalam pidato yang tampaknya sederhana seperti tantangan “cium lutut” Wakil Gubernur Kalimantan Barat terhadap Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat.

PENUTUP

Berdasarkan kajian analisis wacana kritis terhadap pidato Krisantus Kurniawan merupakan praktik diskursif yang secara sadar dirancang untuk membangun dan meneguhkan kekuasaan serta legitimasi melalui pilihan bahasa yang mengandung muatan ideologis (Thohir et al., 2021). Ekspresi “cium lutut” tidak dapat dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai metafora hiperbolik yang berfungsi menegaskan dominasi pembicara sekaligus menguji dan menantang legitimasi pihak lain dalam konstelasi politik.

Secara tekstual, pemanfaatan diksi yang bersifat konfrontatif dan retorik menunjukkan adanya strategi pembentukan citra kepemimpinan yang tegas, percaya diri, dan responsif terhadap kritik. Secara diskursif, pidato tersebut hadir sebagai respons atas tekanan opini publik yang berkembang di ruang digital, khususnya terkait perbandingan kondisi infrastruktur antara Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Pidato seorang pemimpin yang memproduksi wacana politik tidak bersifat otonom, melainkan dipengaruhi oleh dinamika komunikasi media dan persepsi masyarakat (Fauzi dan Sabardila, 2023).

Berdasarkan praktik sosial, konstruksi wacana mencerminkan strategi legitimasi yang dibangun melalui rasionalisasi kondisi struktural, seperti perbedaan karakteristik wilayah dan keterbatasan kapasitas anggaran daerah (Fawaid et al., 2025). Argumentasi tersebut berfungsi mengalihkan fokus dari kritik terhadap kinerja personal menuju pemahaman atas realitas objektif yang lebih luas, sehingga memperkuat posisi pemerintah sebagai aktor yang rasional. Dalam konteks ini, figur Dedi Mulyadi berperan sebagai pembanding simbolik yang justru dimanfaatkan untuk menegaskan batas relevansi dalam perbandingan antarwilayah.

Bahasa pidato mempunyai fungsi dan dampak pada mekanisme kontrol diskursif yang mengarahkan cara pandang publik agar tidak terjebak pada interpretasi yang dianggap keliru. Dengan demikian, legitimasi tidak hanya dibangun melalui argumentasi rasional, tetapi juga melalui pengelolaan makna dan pembatasan tafsir terhadap realitas sosial.

Berdasarkan teori Norman Fairclough, konstruksi kekuasaan dan legitimasi dalam pidato ini terbentuk melalui relasi dialektis antara teks, praktik diskursif, dan konteks sosial yang melingkupinya (Lubis, 2020). Pidato tersebut memperlihatkan bagaimana bahasa dimanfaatkan secara strategis untuk mempertahankan otoritas, merespons tekanan publik, serta membentuk persepsi dalam arena politik yang kompetitif.

Penelitian ini menegaskan bahwa wacana politik merupakan ruang strategis dalam produksi dan reproduksi kekuasaan. Oleh sebab itu, kemampuan masyarakat dalam membaca dan menafsirkan bahasa politik secara kritis menjadi penting agar penilaian terhadap praktik kekuasaan dapat dilakukan secara lebih reflektif, rasional, dan kontekstual.

Saran berdasarkan hasil temuan ini kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti seberapa besar pengaruh pidato pejabat publik terhadap kritik Masyarakat pada media digital. Saran kepada pejabat publik agar bekerja melayani masyarakat dengan sepenuh hati, menjawab kritik Masyarakat bukan hanya dengan orasi politik, tetapi menjawab dengan kerja nyata, dengan pembangunan-pembangunan yang terus berkembang. Bila perlu, pemerintah terus mengevaluasi kinerja dan kebijakan-kebijakannya, terus mengecek Pembangunan yang ada di daerahnya agar jangan sampai menuai kritik, sebelum di kritik menunjukkan Pembangunan secara riil sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawan, J., Reyhan, I. E., & Christianto, A. (2025). Konstruksi Realitas Politik dalam Media Sosial: Studi Perilaku Pemilih di Era Informasi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1220-1227. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1472>.
- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi Media dan Dinamika Komunikasi dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang Ilmu Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168-181. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.554>.
- Anggrianto, F. (2022). *Analisis Wacana Kritis (Kajian Eufemisme dan Disfemisme dalam Wacana)*. Unitomo Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=i84qEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=analisis+wacana+kritis+&ots=3S2PuIoaC8&sig=csOc2g8rSwuDyKBqHXhRJ4oJTtg&redir_esc=y#v=onepage&q=analisis+wacana+kritis&f=false.
- Ardhi, S. (2026). *Tantangan Wagub Kalimantan Barat untuk Gubernur Jabar, Janji Cium Lutut Dedi Mulyadi Jika Berhasil*. Tribun Bogor. <https://bogor.tribunnews.com/berita-menarik/312767/tantangan-wagub-kalimantan-barat-untuk-gubernur-jabar-janji-cium-lutut-dedi-mulyadi-jika-berhasil>.
- Budiarsih, S., & Asropah, A. (2024). Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Pada Teks Pidato Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Tahun 2024. *Parafrasa: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajaran*, 6(2), 7-16. <https://journals.unikal.ac.id/index.php/parafrasa/article/view/200>.
- Chabert-Liddell, S.-C., Barbillon, P., Donnet, S., & Lazega, E. (2021). A Stochastic Block Model Approach for The Analysis of Multilevel Networks: An Application to The Sociology of Organizations. *Computational Statistics & Data Analysis*, 158, 107179. <https://doi.org/10.1016/j.csda.2021.107179>.
- Chasanah, O. S., & Setiana, L. N. (2025). Interferensi Bahasa pada Film Sekawan Limo. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 13(1), 58–66. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jpbsi/article/view/45319>.
- Choiriyah, F. N. U. R., Wardani, O. P., & Arsanti, M. (2024). Dampak Dehumanisasi pada Tokoh Rea dan Fara dalam Web Series My Nerd Girl 2022. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 12(1), 67–72. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jpbsi/article/view/37706>.
- Durmaz, Z., & Salih, M. (2022). *A Critical Discourse Analysis of a Visual Image in Norman Fairclough 's CDA Model **. September 2021, 0–1. <https://doi.org/10.52134/ueader.1101763>.
- Fathilah, S. A., Fitrayani, A., & Bahtiar, S. (2025). Konstruksi Realitas Sosial melalui Algoritma Media Digital dalam Perspektif Ilmu Sosial Modern Indonesia. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(4), 174-182. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i4.453>.
- Fauzi, A., & Sabardila, A. (2023). Retorika Politik dalam Pidato Presiden 16 Agustus 2023: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana. *Jurnal Basataka (JBT)*, 6(2), 414-428. <https://doi.org/10.36277/basataka.v6i2.299>.
- Fawaid, A., Arum, D. P., & Huda, M. (2025). Subalternitas dan Politik Representasi Indonesia Othering dan Self-Branding. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 13(2), 1–13. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jpbsi/article/view/48990>.
- Ferlien, Y., & Rumaif, N. (2020). Analisis Pidato Prabowo Subianto dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Frasa: Jurnal Keilmuan Bahasa*, 1(2), 100–120.
- Ferrari, F. (2022). *The Development of Political Institutions: Power, Legitimacy, Democracy* (p. 216). University of Michigan Press.
- Hajrah, H., Jufri, J., & Dalle, A. (2024). Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Joko Widodo: AWK Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(3), 2472-2483. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i3.3858>.
- Harun, H., Alam, A. M., & Jufri, J. (2024). Analisis Wacana Kritis pada Pidato Presiden Tahun 2022: Model Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(1), 169-181. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3163>.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Equilibrium* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Igbashangev, P. A. (2022). *A Critical Discourse Analysis of Some Selected Speeches of Professor Patrick Lumumba Paul*. 1–30.
- Joinaldy, A. (2025). *Analisis Preferensi Politik Masyarakat terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2024 di Sumatera Barat*. 7(1), 16–30.
- Kaluku, K., Amame, A. P. O., Laali, S. A., Mailuhuw, L. F., Saptaningrum, E., Hidayati, N. A., & Alfari, L. (2023). *Pengantar Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Get Press Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_TEKNIK_PENULISAN_KARYA_ILMIAH/Nx7eEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- KhosraviNik, M. (2022). Digital Meaning-Making Across Content and Practice in Social Media Critical Discourse

- Studies. *Critical Discourse Studies*, 19(2), 119-123. <https://doi.org/10.1080/17405904.2020.1835683>.
- Komariyah, S., Itaristanti, I., & Mulyaningsih, I. (2022). Kajian Tindak Tutur Ilokusi Iklan Produk Kecantikan di Televisi. *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, 9(1), 65-69. <https://doi.org/10.30595/mtf.v9i1.12419>.
- Liu, X., Li, D., Ma, M., Szymanski, B. K., Stanley, H. E., & Gao, J. (2022). Network Resilience. *Physics Reports*, 971, 1–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.physrep.2022.04.002>.
- Lubis, N. (2020). Cadar dalam Ruang Publik: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Instagram@Aisyiyahpusat. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 6(2), 209-224. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.2132>.
- Moghaddam, K. A. (2024). Critical Discourse Analysis: A review of The Views of Ernesto Laclau, Chantal Mouffe and Norman Fairclough. *International Journal of Advanced Research in Humanities and Law*, 1(2), 86-90. <https://doi.org/10.63053/ijrel.16>.
- Nawaz, M. H., Ikhtiar, A., Raza, A. M., & Nouman, M. (2024). Critical Discourse Analysis of Political Speeches in Pakistan: Power, Ideology and Language Manipulation. *Futurity Proceedings*, 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13772472>.
- Nurrahmi, N. I. (2021). Analisis Kesalahan Berbahasa pada Penulisan Autobiografi Karya Mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Surakarta. *Tabasa: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya*, 2(1), 125-162. <https://doi.org/10.22515/tabasa.v2i1.3265>.
- Pakpahan, S. J., Simamora, L. M., Samosir, E. O., & Hadi, W. (2024). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk pada Teks Berita Liputan6.com Mengenai Perubahan Seragam oleh Kemendikbudristek. *Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(1), 85-94. <https://doi.org/10.17509/artikulasi.v4i1.69162>.
- Rahmatulloh, R., Wardana, A. K., Sobahri, M., Syaban, R. F., & Laksana, A. (2024). Etika Berkomunikasi di Media Sosial: Perspektif Generasi Z. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 44-50. <https://doi.org/10.62383/studi.v1i4.52>.
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 32-41.
- Rumaf, N., Anshori, D. S., Damaianti, V. S., Sastromiharjo, A., & Al Jumroh, S. F. (2025). Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Prabowo Subianto: Tinjauan AWK Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 11(2), 2111-2124. <https://doi.org/10.30605/onoma.v11i2.5790>.
- Scherz, A. (2022). *Tying Legitimacy to Political Power: Graded Legitimacy Standards for International Institutions*. 0–24.
- Schwörer, J. (2021). Don't Call Me A Populist! The Meaning of Populism for Western European Parties and Politicians. *Electoral Studies*, 72, 102358. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.electstud.2021.102358>.
- Siregar, B., Solihin, O., & Rantona, S. (2024). Jurnalisme Clickbait Di Era Digital: Mengungkap Strategi Pemilihan Diksi Judul Berita Oleh Detik.Com. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(1), 222–231. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2804>.
- Thohir, A., Supriadi, D., Mulyana, Arifin, F., & Septiadi, M. A. (2021). The Struggle of Freemasonry and Islamic Ideology in The Twentieth Century During Colonialization in Indonesia. *Heliyon*, 7(10), e08237–e08237. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08237>.
- Wardani, O. P., Arsanti, M., & Aida, D. A. N. (2022). Nilai Moral dalam Tuturan Film Pendek “Reunion” Episode Karya Kemendikbud RI Dirjen Pendidikan Vokasi. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 10(1), 64-71. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jpbsi/article/view/22321>.